



Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara (ORIDABS): Sejarah dan Perannya Dalam Perekonomian Daerah Banten 1947-1948

Usmaedi¹

Pendidikan Sejarah/Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Lebak, Banten, Indonesia¹

RIWAYAT ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 17 Desember 2023

Diterima dalam bentuk revisi

22 Desember 2023

Diterima 28 Desember 2023

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi kehidupan ekonomi di Banten Tahun 1947-1948, pada masa perjuangan kemerdekaan RI dimana pusat pemerintahan berada di Yogyakarta, Suasana perang yang terus terjadi menyebabkan sulitnya pengedaran Oeang Republik Indonesia (ORI) di beberapa wilayah Republik Indonesia, langkanya ORI dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh NICA untuk mengedarkan mata uangnya sendiri. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah. ORIDABS secara politik ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia di daerah Banten karena pemerintahan pusat berada di Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan yaitu metode Historis yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritis, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. Sedangkan Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai buku, Koran, wawancara dan arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam masa awal perjuangan Indonesia yang baru merdeka, maka Indonesia membutuhkan sebuah pengakuan internasional di bidang perekonomian. Oleh karena itu Indonesia perlu memiliki mata uang sendiri sebagai identitas bangsa. Peranan ORIDABS sebagai mata uang di Banten membuat perekonomian berjalan dengan semestinya karena masyarakat dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan dengan menggunakan mata uang ORIDABS.

Kata kunci:

ORIDABS, De Javasche Bank,
Banten

¹ Usmaedichalid@upi.edu

PENDAHULUAN

Perjuangan yang dilakukan pada masa Revolusi Fisik tidak saja membutuhkan tenaga manusia, taktik dan strategi perjuangan, melainkan juga membutuhkan dana untuk mendukung perjuangan tersebut. Akibat suasana kacau setelah perang, kebutuhan manusia harus tetap dipenuhi sehingga kegiatan perekonomian harus dapat terus berlangsung.

Pada akhir pendudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) Inflasi yang tinggi, penyebab inflasi yang tinggi karena beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali dan masih diberlakukannya uang-uang seperti uang Pemerintah Hindia Belanda serta uang *De Javasche Bank* oleh pemerintah Indonesia. (2) Adanya blokade ekonomi oleh Belanda (NICA), blokade yang dilakukan oleh Belanda berupa penutupan pintu keluar-masuk perdagangan Republik Indonesia, sehingga barang-barang dagang milik Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor. (3) kas Negara Kosong, pajak dan bea cukai sangat berkurang sehingga pendapatan pemerintah berkurang tidak sebanding dengan pengeluaran (<http://wikipedia.org/>).

Meskipun di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) telah berdiri pemerintahan Republik Indonesia (RI), Belanda tetap berkeyakinan bahwa wilayah Indonesia masih berada ditangan Pemerintah Hindia Belanda, Dengan berbagai cara Belanda berusaha menjaga eksistensinya di Hindia Belanda. Sehingga secara *de facto* adanya dua Pemerintahan di wilayah Indonesia yaitu pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Sipil Belanda (NICA). Keadaan tersebut berpengaruh pada dunia perekonomian Indonesia, sehingga pada tahun 1945-1949 kegiatan perekonomian telah berjalan dalam dua wilayah pemerintah yang berbeda. Situasi politik di Banten sangatlah dipengaruhi oleh situasi politik di Jakarta sehingga kondisi keamanan tidak stabil, banyak masyarakat di Banten tidak puas akan kepemimpinan Residen yang di pimpin oleh R.Ng.Tirtasoejatna yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan di Banten yang mengakibatkan pergantian Residen.

Di Banten, meskipun sudah dibentuk keresidenan dan sudah ditunjuk Residen dan Wakil Residennya, yaitu R.Ng.Tirtasoejatna (*eks Fuku Syucokan/Wakil Residen*) dan R.Dzulkarnaen Soeria Kartalegawa (*eks Gico Syu Sangikai/Ketua Dewan Perwakilan Residen*), tetapi nampaknya mereka tidak bisa menjalankan tugasnya karena tidak dikendaki oleh sebagian masyarakat Banten. Dalam situasi seperti itu, para pemuda API (Angkatan Pemuda Indonesia) mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Banten. Dalam Pertemuan di kediaman R.Dzulkarnaen Soeria Kartalegawa itu hadir perwakilan dari golongan ulama, pemuda, jawara, wanita, dan perwakilan dari Kabupaten Pandeglang serta Lebak. Golongan ulama diwakili oleh K.H. Tb. Achmad Chatib, K.H. Sjam'un dan Kiai Rafiudin. Golongan pemuda diwakili oleh Ali Mangkoe, Bachtiar Rivai, Nafsirin, Hardi, dan Tachril. Golongan *jawara* antara lain diwakili oleh Soeleman Goenoengsari, Kamid, Mardan dan Sjarif. Golongan wanita antara lain diwakili oleh Sri Sahoeli, Maemoenah, dan Roemsiah. Perwakilan dari Kabupaten Pandeglang yaitu K.H. Djoenaedi. Dalam pertemuan itu mereka membicarakan masalah pembagian tugas dimana para pemuda mendesak agar K.H. Tb. Achmad Chatib sebagai fitur rakyat segera diangkat menjadi Residen yang menangani masalah administratif dan pemerintahan sipil di Keresidenan Banten, sedangkan untuk urusan militer diserahkan kepada K.H. Sjam'un (Nina Lubis, 1993).

Pemerintah Pusat nampaknya tidak punya pilihan lain selain mengabdikan keinginan tokoh masyarakat Banten itu sehingga lewat Radiogram, K.H. Tb. Achmad Chatib resmi diangkat sebagai Residen Banten. K.H. Tb. Achmad Chatib lahir di kampung Gayam, Pandeglang, pada tahun 1895. Ayahnya adalah K.H. Tb. Moehammad Waseh, seorang ulama terkenal di Pandeglang. Ia menikah dengan Ratoe Hasanah, putri K.H. Asnawi, seorang ulama terkenal di Caringin. Tahun 1917 ia menjadi anggota Sarekat Islam, dan anggota *daidanco* PETA di Banten setelah terjadi pemberontakan komunis tahun 1926 ia dibuang ke Boven Digul dan baru dibebaskan tahun 1942 (Nina Lubis, 1993).

Setelah Residen Banten yang dipilih rakyat, K.H. Tb. Achmad Chatib mulai menjalankan tugas dan menyusun personalia Pemerintahan Keresidenan Banten. Dalam menyusun pemerintahannya itu ia tetap menggunakan pejabat dan pegawai lama, dengan pertimbangan bahwa untuk menangani administratif pemerintahan diperlukan orang-orang yang biasa menanganinya. Ia kemudian menunjuk R. Dzoelkarnaen Soerja Kartalegawa sebagai wakil Residen. Lalu ia menunjuk Raden Tumenggung Aria Hilman Djajadiningrat Wiriaatmadja sebagai Bupati Pandeglang dan Raden Tumenggung Hardiwinangoen sebagai Bupati Lebak. Untuk jabatan KNI tingkat Kabupaten menunjuk Mohamad Mansur alias The Mamat untuk Kabupaten Serang, Mohamad Ali untuk Kabupaten Pandeglang dan Raden Agoes Djajaroekmantara untuk Kabupaten Lebak (Nina Lubis, 1993).

Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai lambang utama negara yang baru merdeka. Suasana perang yang terus terjadi menyebabkan sulitnya pengedaran ORI di beberapa wilayah Republik Indonesia, langkanya ORI dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh NICA untuk mengedarkan mata uangnya sendiri. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah.

Akibat dari blokade oleh Belanda di Keresidenan Banten tidak menerima kiriman uang dari Pemerintah Pusat, maka untuk mengatasi hal itu dikeluarkan uang sendiri yang berlaku di wilayah Keresidenan Banten, uang tersebut dikenal sebagai *Oeang Republik Indonesai Daerah Banten Sementara* (ORIDABS). Pengeluaran uang itu didasarkan pada jaminan adanya tambang emas di Cikotok (Nina H Lubis, 2006).

ORIDABS secara politik ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia di daerah Banten karena pemerintahan pusat berada di Yogyakarta sedangkan perekonomian harus terus berjalan agar menunjang kebutuhan masyarakat Banten dalam keadaan konflik. Sehingga pemerintah pusat memerintahkan Residen Banten Tubagus Kiai Haji Achmad Chotib untuk mencetak dan mengedarkan ORIDABS.

Masa pencetakan ORIDABS pada bulan Desember 1947, dengan menggunakan huruf arab dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, seperti klise dibuat dari kayu sawo manila. Pencetakan ORIDABS dicetak di Serang, di jalan Diponegoro No. 6 serang, pemilik percetakannya adalah Abdurrodjak. Pada bulan Desember 1947 beredar uang emisi pertama yang dicetak adalah nilai pecahan Rp. 1,00; Rp. 5,00; Rp. 10,00; Rp. 25,00 dan pada bulan Agustus 1948 keluar emisi kedua, yaitu pecahan Rp. 50 yang jumlahnya tidak diketahui (Nina H Lubis, 2006).

METODE

Metode ini menggunakan metode sejarah karena metode sejarah menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dengan metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan pokok yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Louis Gottschalk. 1983:25).

Langkah-langkah:

1. Heuristik

Heuristik adalah tahapan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan menghimpun sumber, data serta informasi yang valid dan otentik, guna menentukan kredibilitas sumber dan kelayakan materi.

Dalam prosedur kerja seorang sejarawan, langkah pertama yang harus dilalui dalam menyusun sebuah cerita sejarah adalah menemukan jejak sejarah itu sendiri. Dalam metode sejarah, kegiatan ini disebut heuristik. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani "*heurisken*" yang berarti mencari atau menemukan, maksudnya mencari serta menemukan jejak-jejak sejarah menurut Widja, 1988 (dalam www.Wikipedia.org//Muhadjir, 1998: 19).

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik-teknik yang bersifat primer dan sumber sekunder antara lain:

(a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan kesaksian dari seseorang yang menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah. Sumber primer berupa orang, benda atau tulisan yang memiliki keaslian dalam arti tulis tangan, orang pertama, atau dikisahkan oleh orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah.

(b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata dalam peristiwa sejarah. Dengan perkataan lain, sumber yang berasal dari orang yang bukan saksi hidup atau tidak sejaman dengan peristiwa yang sedang diteliti. Untuk mendapat informasi mengenai sumber-sumber sejarah baik primer maupun sumber sekunder, maka diperlukan teknik sebagai berikut:

(1) Wawancara

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan sumber sejarah yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dari para pelaku sejarah ataupun saksi sejarah. Selain itu wawancara merupakan alat mengumpulkan informasi yang berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini serta keyakinan. Dalam teknik wawancara ini dapat dilakukan melalui tanya jawab. Metode wawancara atau *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.

(2) Studi pustaka

Studi pustaka yaitu cara mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan menelaah sumber atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini, maka bahan-bahan yang ditelaah berupa buku-buku yang berhubungan dengan ORIDABS yang didapat dari berbagai buku-buku seperti, ANRI. *Oeang Republik Indonesia (ORI)*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten. 2004. *Inventarisasi dan Redokumentasi Benda Cagar Budaya (BCB) dan Situs Tahap I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak)*, Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, E. Kosim. *Metode Sejarah Asas dan Proses*, Nina H Lubis. *Tradisi dan Transportasi Sejarah Sunda*, Nina H Lubis. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah Sultan, Ulama, Jawara*, Nina H Lubis. *Sejarah Kabupaten Lebak*, Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif-edisi revisi*.

(3) Studi dokumen (tertulis)

Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis, sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku-buku, Koran, Majalah atau yang sejenis, studi dokumen adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, dan arkeologis. Jadi studi dokumen yaitu berwujud dalam bentuk objek tertulis atau yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumen tertulis yang berupa catatan mengenai ORIDABS, maupun sumber yang tidak tertulis seperti berupa foto, selain dari Arsip Dari hasil penelitian, sumber yang didapat mampu memberikan sumbangan bagi penulis untuk keperluan melengkapi data, baik tertulis maupun berupa foto.

2. Kritik

Kritik adalah tahapan/kegiatan meneliti sumber, informasi terhadap daftar pustaka yang akan dijadikan acuan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi. Setelah kita berhasil menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah, maka selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber yaitu menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, asli dan relevan. Kritik sumber ini bermaksud untuk menentukan kredibilitas dari jejak-jejak sejarah (Widja, 1988 dalam www.wikipedia.org //Muhadjir, 1998: 21).

Menurut Coensuelo G. Sevilla dkk, kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal antara lain:

(1) Kritik Internal

Apabila sumber yang diperoleh itu merupakan sumber asli, maka langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali, arti dan layaknya suatu dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai data. Hal ini meliputi pengertian kata-kata dari pernyataan yang ditulis termasuk didalamnya adalah menentukan kredibilitas pernyataan penulis sehingga sumber tersebut benar-benar dapat dipercaya.

(2) Kritik Eksternal

Meliputi penemuan, jika bahan sumber asli yang mempunyai integritas tekstual tekstual. Dalam hal ini perlu di cek atau diteliti di dalam suatu dokumen yang dapat diterima sebagai bukti, apakah suatu dokumen tersebut benar-benar sesuai dengan yang ditulis didalamnya dan sama dengan aslinya. Kritik eksternal bertujuan untuk menetapkan otentik tidaknya atau asli tidaknya sumber yang dipakai. Kritik eksternal berusaha menjawab pertanyaan tentang keotentikan dan keaslian sumber yang digunakan (Nugroho Notosusanto, 1975: 39 (dalam www.wikipedia.org).

3. Interpretasi

Setelah kritik sumber itu setelah dikerjakan, maka jejak-jejak sejarah yang berhasil didapatkan itu biasa diwujudkan sebagai fakta sejarah. Interpretasi atau sintesis merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat sehingga dari fakta yang diperoleh dapat membayangkan bagaimana rupanya masa lampau itu (Lexy J Moleong, 2006:151). Tujuannya agar data yang ada mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkannya, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun. Kemudian disusun menjadi satu rangkaian yang sistematis dan masuk akal.

Interpretasi dalam prosesnya untuk mendapatkan gambaran sejarah yang bersifat ilmiah, logis dan integrasi untuk mencapai target tersebut tergantung dari kemampuan penulis skripsi, terutama kemampuan dalam menuangkan kedalam tulisan. Interpretasi atau sintesis merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat sehingga dari fakta yang diperoleh dapat membayangkan bagaimana rupanya masa lampau itu (Lexy J Moleong, 2006: 151).

4. Historiografi

Historiografi adalah tahapan/kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imaginative dari masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. Dengan perkataan lain, tahapan Historiografi itu ialah tahapan kegiatan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-faktaitu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Di sini kita tiba pada persoalan kemahiran mengarang (E.Kosim, 1980: 31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ORI Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

Setelah pernyataan kemerdekaan dikumandangkan sebagai bangsa yang merdeka banyak usul dari masyarakat termasuk *Pers* yang mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang sendiri, karena ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekacauan situasi keuangan yang beredar dalam masyarakat. Tindakan Pemerintah Republik Indonesia pada mulanya mengeluarkan Ketetapan pada 3 Oktober 1946, bahwa masa uang yang dikeluarkan Jepang dan Belanda masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diseluruh wilayah Republik, yang termuat dalam Maklumat Presiden RI Nomor 1/10 (ANRI, 2003: 3).

Untuk menentukan ORI bukanlah merupakan perjuangan yang ringan, sebab waktu itu pemerintah pendudukan Belanda menghendaki uang yang beredar di Indonesia adalah uang NICA. Sebelum ORI dikeluarkan, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Keuangan Safruddin Prawiranegara menyampaikan pidato melalui RRI, yaitu pada tanggal 29 Oktober 1946 malam. Dalam pidato itu disampaikan pemberitahuan tentang diresmikannya ORI sebagai alat pembayaran yang sah, tentang kedudukan, fungsi dan peranan ORI, serta tentang sikap dan tindakan yang perlu dilakukan oleh semua Bangsa Indonesia agar cita-cita kemerdekaan Indonesia tercapai (ANRI, 2003:5).

Kemudian Pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang Pinjaman Nasional dan Kewajiban uang dalam Bank sebagai tahap persiapan sebelum beredarnya uang sendiri, yang dibuat sendiri oleh Pemerintah RI yang dikenal dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI).

Dasar Hukum penerbitan ORI adalah:

1. UU No. 17/1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang pengeluaran ORI
2. UU No. 19/1946 tanggal 19 Oktober 1946 tentang nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa atau 100 rupiah uang Jepang di pulau Sumatra dan ditentukan juga bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Keputusan Menteri Keuangan RI No. Ss/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 tentang berlakunya secara sah ORI sejak tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00:00, serta jangka waktu penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran (ANRI, 2003: 5).

Dengan beredarnya mata uang ORI, harga-harga barang berangsur-angsur kembali normal seperti sebelum perang, akan tetapi apa daya ekonomi sudah kacau, dimana rakyat banyak yang sudah tidak memiliki apa-apa sehingga Pemerintah Indonesia pada saat itu menyelenggarakan usaha pembagian uang RI kepada rakyat kecil, dimana setiap satu jiwa berhak memperoleh 1 rupiah dan untuk setiap kepala keluarga ditambah dengan sebesar 3 sen. Emisi pertama ORI diterbitkan pada tanggal 30 September 1946, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Keuangan, meskipun pada ORI tercantum 17 Oktober 1945. ORI yang terdiri atas lima emisi dikeluarkan untuk menggantikan uang Jepang dan Uang *De Javasche Bank*.

ORI secara politik ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik, juga untuk menyehatkan ekonomi yang dilanda inflasi hebat. Ditinjau dari sudut keuangan Negara, pencetakan ORI memperkuat kedudukan pemerintah, karena kini pemerintah Republik Indonesia mempunyai mata uang sendiri. Padahal sebelumnya kas Negara hanya mempunyai saldo sedikit yang berasal dari Fonds (dana) Kemerdekaan.(ANRI, 2003: 5). Tetapi dalam realita di lapangan keberadaan ORI dengan NICA terjadi gesekan sehingga terjadilah perang uang di daerah-daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan kota-kota besar lain yang diduduki Belanda. Pertarungan kewibawaan dua mata uang dan dua pihak saling berbeda kepentingan itu memaksa setiap orang harus memilih, menolak atau menerima uang NICA ataupun uang ORI. Tidak jarang suasana yang demikian itu menimbulkan insiden penganiayaan dan pengorbanan lain. Penduduk yang setia kepada Republik selalu dan hanya mau menggunakan ORI sebagai alat pembayaran dan alat penukaran dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Tetapi pihak NICA sering memaksakan pemakaian uang mereka terhadap rakyat. Dalam kenyataannya makin lama ORI makin populer di kalangan rakyat. Begitu populernya ORI di kalangan rakyat, sehingga ada surat kabar Republik yang terbit di Jakarta pernah memuat berita dengan judul "Uang Kita Menang, Kata Rakyat Jakarta" (ANRI, 2003: 7).

Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal Belanda mengajukan nota kepada pihak Republik Indonesia yang harus dijawab dalam tempo 14 hari. Antara lain isinya mengajak agar kedua belah pihak mengeluarkan uang bersama yang akan menentukan nilai uang itu terhadap uang asing. Meskipun pada prinsipnya usul pihak Belanda itu diterima, namun tidak pernah dilaksanakan karena masalah-masalah lain yang segera timbul, terutama masalah politik yang berkaitan dengan masalah tersebut tidak mencapai titik temu. ORI tetap berlaku hingga ditarik kembali dari peredarannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada bulan Maret 1950 (ANRI. 2003: 7).

2. Terbitnya Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA)

Akibat adanya Blokade AL Belanda pada bulan Nopember 1945, hubungan antara pusat dan daerah sulit. Sesudah Clash I (masa dimana Belanda berusaha kembali ke daerah jajahannya yaitu Hindia Belanda dengan membonceng/NICA), Indonesia mengalami kesulitan perhubungan antara daerah, terutama antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Maka didirikanlah percetakan-percetakan uang diberbagai daerah. ORI kemudian muncul dalam berbagai bentuk yang diciptakan didaerah masing-masing menurut kondisi dan situasi setempat. Untuk memperlancar perjuangan di daerah-daerah terutama dalam bidang ekonomi, pemerintah d pertahanan , banyak dicetak uang darurat di berbagai tempat. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh penguasa setempat sebagai pembayaran yang hanya berlaku di daerah tertentu, sehingga disebut dengan nama Uang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

Situasi ini memaksa daerah-daerah mencetak uang sementara agar perekonomian bisa berjalan dengan baik sehingga ORIDA merupakan alat politik dan ekonomi pemerintah daerah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sebagai roda perekonomian masyarakat sehingga ekonomi tidak kacau. Daerah yang mencetak ORIDA seperti daerah Sumatra Utara yang dikenal dengan nama ORIPSU (ORI Sumatra Utara), ORIDABS (ORI Daerah Banten Sementara), ORITA (ORI Tapanuli), ORIN (ORI Kabupaten Nias), ORILA (ORI Lampung) dll.

ORIDA dikeluarkan oleh pemerintah Pusat untuk memenuhi uang di daerah sehingga ORIDA hanya berlaku di Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Karesidenan dan Kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947-1949. Pada prinsipnya ORIDA ini terbit atas ijin Pemerintah Pusat RI yang bertujuan memecahkan masalah kekurangan uamh tunai di daerah-daerah akibat terputusnya jalur komunikasi normal dan supply uang antara pusat dan daerah, karena meluasnya daerah pendudukan Belanda sebagai akibat agresi militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer II Belanda 19 Desember 1948.

ORIDA pertama di Jawa adalah daerah Banten yaitu ORIDABS (Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara) yang dicetak pada tanggal 15 Desember 1947, dicetak di Kota Serang, Banten. Sedangkan ORIDA (Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatra) pada tanggal 31 Maret 1947, dicetak di Pematang Siantar. Di Karesidenan Banten ORIDABS (Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara) didasarkan atas jaminan adanya tambang emas di Cikotok. Uang itu dicetak di Serang dengan menggunakan peralatan yang sederhana, seperti klise dibuat dari kayu sawo manila (Nina Lubis. 2006: 300).

3. Sejarah Lahirnya ORIDABS

Akibat adanya Blokade AL Belanda pada bulan Nopember 1945, hubungan antara pusat dan daerah sulit. Sesudah *Clash* I (masa dimana Belanda berusaha kembali ke daerah jajahannya yaitu Hindia Belanda dengan membonceng/NICA), Indonesia mengalami kesulitan perhubungan antara daerah, terutama antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Maka didirikanlah percetakan-percetakan uang diberbagai daerah. ORI kemudian muncul dalam berbagai bentuk yang diciptakan didaerah masing-masing menurut kondisi dan situasi setempat. Untuk memperlancar perjuangan di daerah-daerah terutama dalam bidang ekonomi, pemerintah d pertahanan , banyak dicetak uang darurat di berbagai tempat. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh penguasa setempat sebagai pembayaran yang hanya berlaku di daerah tertentu, sehingga disebut dengan nama Uang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

ORIDA dikeluarkan oleh pemerintah Pusat untuk memenuhi uang di daerah sehingga ORIDA hanya berlaku di Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Karesidenan dan Kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947-1949. Pada prinsipnya ORIDA ini terbit atas ijin Pemerintah Pusat RI yang bertujuan memecahkan masalah kekurangan uamh tunai di daerah-daerah akibat terputusnya jalur komunikasi normal dan supply uang antara pusat dan daerah, karena meluasnya daerah pendudukan Belanda sebagai akibat agresi militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer II Belanda 19 Desember 1948.

Kondisi seperti ini membuat Pemerintah Daerah Banten mengeluarkan berbagai kebijakan guna keluar dari krisis ekonomi rakyat di Banten, seperti sejak September 1947 adanya peraturan untuk semua pedagang harus memiliki lisensi untuk melakukan ekspor barang-barang tertentu seperti kopra, kopi, dan minyak dengan catatan membayar pajak penghasilan dan wajib memberikan sumbangan untuk pertahanan daerah, juga sepulang melakukan ekspor wajib membawa bahan pakaian dan onderdil kendaraan yang diperlukan oleh rakyat. Akan tetapi, peraturan itu tidak dipenuhi oleh seorang pedagangpun di Banten (Suharto, 2001: 172).

Krisis ekonomi mulai merambat pada krisis moneter, akibat tersendatnya kiriman uang dari Pemerintah Pusat ke Banten. Untuk memenuhi kebutuhan moneter masyarakat Banten terutama gaji para pegawai, Pemerintah Daerah Banten berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta, yang dipromotori oleh Pembantu Gubernur Mr. Joesoep Adiwinata dan R. Lumanauw, Kepala Kantor Keuangan Karesidenan Banten, pada bulan September 1947 mempersiapkan mengeluarkan uang sendiri bernama “Uang Kertas Darurat Untu Daerah Banten” yang terkenal dengan sebutan ORIDABS (Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara). Jaminan mengeluarkan ORIDABS atas adanya jaminan tambang emas di Cikotok Kab. Lebak (Nina Lubis, 2006: 300)

ORIDABS dicetak di Serang di jalan Diponegoro, di mana percetakan uang ORIDABS tersebut dicetak di kantor Percetakan Fritz Rozak tempat pembuatan “*Koran De Banten Bode*”. Dan ditandatangani oleh Residen Banten K.H.Achmad Chatib dan Panitia Keuangan (Lukman Hakim, 2004).

Peredaran emisi pertama ORIDABS pecahan Rp.1.00, Rp.5.00, Rp.10.00 dan Rp.25.00 dilakukan bulan Desember 1947. Dalam ORIDABS pecahan Rp.25.00.- tertulis tanggal 15 Desember 1947 berwarna merah bergambar masjid agung Banten dan gerbang masjid Kenari, serta senjata kujang dan debus (gada), yang ditandatangani oleh Residen Banten K.H.Achmad Chatib dan Panitia Keuangan. Sedangkan pecahan Rp.50.00.-dikeluarkan pada emisi kedua bulan agustus 1948. Bentuk ORIDABS yang sederhana dan kualitas cetakannya yang rendah, dimana pembuatan ORIDABS menggunakan Klise yang dibuat dari kayu sawo manila oleh tim dipimpin Edel Jusuf yang di bantu Dana dan Roejani, seorang guru Sekolah Dasar, di sebuah ruangan di belakang kantor Inspeksi Keuangan Karesidenan Banten yang dibuat sebagai Bagian Zincografi, bagian pembuat klise uang (Suharto, 2001:173).



Figure 1

Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten 25 Rupiah Diliat Dari Depan
(Sumber Arsip Museum Bank Indonesia)

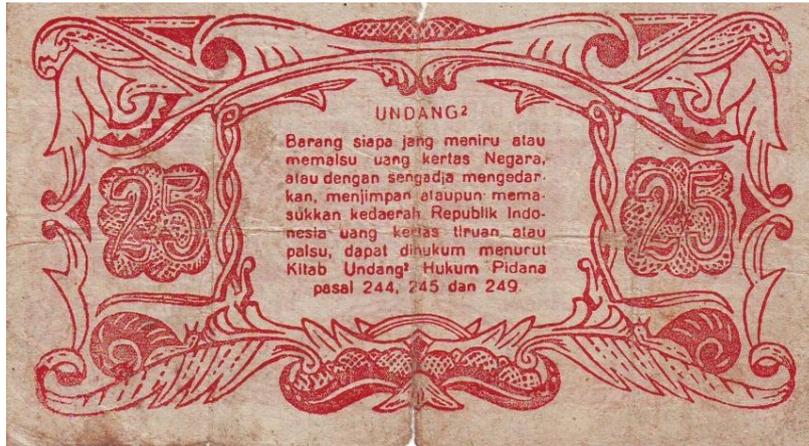


Figure 2
Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten 25 Rupiah Diliat Dari Belakang
(Sumber Arsip Museum Bank Indonesia)



Figure 3
Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten 50 Rupiah
(Sumber Koran Harian Fajar Banten)

Akan tetapi keyakinan orang Banten terhadap Republik Indonesia tak tergoyahkan, bahkan dalam keadaan sulit Banten masih dapat membantu Pemerintah Pusat dengan mengirimkan ribuan ton bijih emas yang dihasilkan dari tambang Cikotok ke Yogyakarta

untuk dijadikan emas murni yang merupakan sumber penghasil devisa bagi Pemerintah Republik Indonesia.

4. PERANAN ORIDABS DALAM PEREKONOMIAN DAERAH BANTEN

Kondisi Banten yang sudah sangat kritis, dimanfaatkan oleh Belanda dalam gerakan agresi militer yang kedua, menguasai daerah ini. Tidak seperti agresi pertama, Banten benar-benar dirancang untuk diduduki dan dikuasai pasukan militer Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan militer Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Spoor melancarkan serangan ke Yogyakarta dan berhasil menduduki ibukota serta menangkap Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Perlawanan Rakyat yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan kelaskaran dan front-front pemuda bersatu bahu membahu bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi pasukan bersenjata Belanda pada clash pertama dan kedua, ternyata membuahkan hasil yang diinginkan yaitu pengakuan kedaulatan (atau penyerahan kedaulatan menurut Belanda) pada tanggal 27 Desember 1949 (Poesponegoro, 1984: 162).

Dampak blokade Belanda terhadap wilayah Banten, mengakibatkan beberapa komoditas kehidupan sehari-hari sulit diperoleh dan kalau pun ada harganya sangat mahal. Untuk mengatasi hal tersebut berbagai cara dilakukan rakyat dan pemerintah daerah Banten. Tindakan yang dilakukan rakyat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya adalah dengan membuatnya sendiri dan mengganti dengan barang lain. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan akan bensin, rakyat membuatnya dari karet terdapat di Silalangu, lebih kurang 6 Km dari Stasiun Maja. Untuk memenuhi akan garam, rakyat membuatnya sendiri dari air laut. Kebutuhan akan obat-obatan dipenuhi dengan membuat sendiri beberapa jenis obat, seperti obat batuk dibuat dari daun sirih, obat kulit dibuat dari belerang dicampur minyak kelapa sawit, perban dibuat dari kulit pohon pisang bagian dalam.

Peran ORIDABS sebagai mata uang yang berlaku khusus di daerah wilayah Banten, membuat perekonomian di Banten mulai membaik karena adanya mata uang yang dapat di gunakan rakyat Banten untuk bertransaksi di pasar agar bisa memenuhi akan kebutuhan sehari-hari. ORIDABS sebagai mata uang yang sah membuat rakyat Banten tidak resah akan keadaan ekonomi yang tidak stabil dimana suplay uang yang di kirim Pemerintah Republik Indonesia tersendat karena adanya blokade Belanda sehingga mata uang ORI susah sehingga menghambat perekonomian di Banten. Tetapi dengan daerah Banten mengeluarkan ORIDABS membuat sistem perekonomian berjalan dengan semestinya dan pemenuhan akan barang-barang kebutuhan rakyat Banten dapat terpenuhi.

Demikianlah dalam waktu yang relatif pendek, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ORIDABS telah berperan sebagai alat perjuangan. ORIDABS berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Banten, melainkan berfungsi juga sebagai alat revolusi yang mendukung dan memungkinkan daerah Banten untuk mengatur administrasi dan ekonominya, membiayai aparatur Negara dan sekaligus meletakkan dasar kemakmuran rakyat. ORIDABS merupakan uang yang kepercayaan dalam masyarakat dan ini tentunya merupakan dukungan rakyat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari segi ekonomi keberadaan ORIDABS sebagai langkah awal pengembangan sistem moneter yang dilakukan daerah Banten untuk tetap menjaga eksistensi sebuah Negara. Dari segi politik keberadaan ORIDABS sebagai alat perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

ORIDA dikeluarkan oleh pemerintah Pusat untuk memenuhi uang di daerah sehingga ORIDA hanya berlaku di Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Karesidenan dan Kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947-1949. Pada prinsipnya ORIDA ini terbit atas ijin Pemerintah Pusat RI yang bertujuan memecahkan masalah kekurangan uamh tunai di daerah-daerah akibat terputusnya jalur komunikasi normal dan supply uang antara pusat

dan daerah, karena meluasnya daerah pendudukan Belanda sebagai akibat agresi militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer II Belanda 19 Desember 1948.

Kondisi seperti ini membuat Pemerintah Daerah Banten mengeluarkan berbagai kebijakan guna keluar dari krisis ekonomi rakyat di Banten, seperti sejak September 1947 adanya peraturan untuk semua pedagang harus memiliki lisensi untuk melakukan ekspor barang-barang tertentu seperti kopra, kopi, dan minyak dengan catatan membayar pajak penghasilan dan wajib memberikan sumbangan untuk pertahanan daerah, juga sepulang melakukan ekspor wajib membawa bahan pakaian dan onderdil kendaraan yang diperlukan oleh rakyat. Akan tetapi, peraturan itu tidak dipenuhi oleh seorang pedagangpun di Banten

Dari segi ekonomi keberadaan ORIDABS sebagai langkah awal pengembangan sistem moneter yang dilakukan daerah Banten untuk tetap menjaga eksistensi sebuah Negara. Dari segi politik keberadaan ORIDABS sebagai alat perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

REFERENSI

Book:

- ANRI. (2003). *Oeang Republik Indonesia (ORI)*. Jakarta. ANRI
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten. (2004). *Inventarisasi dan Redokumentasi Benda Cagar Budaya (BCB) dan Situs Tahap I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak)*. Serang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten.
- Gottschalk, Louis. (1983). *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Judiseno, K Rinsky. (2005). *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kosim, E. (1980). *Metode Sejarah Asas dan Proses*. Bandung. Universitas Padjadjaran.
- Lubis, Herlina Nina. (2004). *Banten Dalam Pergumulan Sejarah Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta. LP3ES
- Lubis, Herlina Nina (Ed). (2006). *Sejarah Kabupaten Lebak*. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
- Madjiah, Matia. (1993). *Dokter Gerilya*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Moleong, J Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif-edisi revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pusponegoro, Marwati Djuned (Ed). (1994). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Suharto. (2000). *Banten Masa Revolusi, 1945-1949. Proses Intergrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Disertasi)*. Depok. Program Pasca Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Internet :

- <http://www.Jakarta.go.id>
- (Widja. 1988 dalam www.wikipedia.org //Muhadjir, 1998: 21)
- [http://wikipedia.org/keadaan keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia](http://wikipedia.org/keadaan_keadaan_ekonomi_pada_awal_kemerdekaan_Indonesia).
- Soemitro Djojohadikoesoemo. 1947 dalam www.wikipedia.org.